

## Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam

Cantika Niscala Puri, Gonda Yumitro

cantikaniscala@gmail.com, gonda@umm.ac.id

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i1.19717

---

### Abstract

Diplomacy is commonly understood as a country's art, practice, and negotiation activity to advance that country's interests. Currently, conventional diplomacy is being practised, which is seen as having many flaws. Conventional diplomacy appears relatively unclean, so it is necessary to build and strengthen clean diplomacy based on an Islamic perspective, also known as Islamic Diplomacy. The OIC's Islamic diplomacy is very different from conventional diplomacy, which has flaws and is relatively dirty in its execution. This article attempts to analyze the role of the Organization of Islamic Cooperation in strengthening Islamic diplomacy using a descriptive qualitative approach. Islamic diplomacy, which prioritizes peace and cooperation to solve problems, is deemed appropriate to protect and defend Muslims' vital interests and to find solutions to conflicts. The authors also found that the OIC plays two essential roles in strengthening Islamic diplomacy. First, by prioritizing cooperation and peace, the OIC optimizes diplomacy. Second, diplomacy focuses on conflict prevention and resolution. This finding could be an alternative to developing Islamic diplomacy as another way of international relations.

### Abstrak

Diplomasi secara umum dipahami sebagai seni, praktik, dan kegiatan negosiasi untuk meraih kepentingan suatu negara. Diplomasi konvensional yang selama ini dipraktikkan dinilai memiliki berbagai kekurangan. Diplomasi konvensional dipandang relatif tidak bersih, sehingga penting untuk membangun dan memperkuat diplomasi yang bersih berdasarkan perspektif Islam yang disebut sebagai diplomasi Islam. Diplomasi Islam yang dilakukan oleh OKI sangat berbeda dengan diplomasi konvensional yang memiliki banyak kekurangan dan relatif tidak bersih dalam pelaksanaannya. Artikel ini berupaya menganalisis peran Organisasi Kerjasama Islam dalam penguatan Diplomasi Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penggunaan Diplomasi Islam yang mengedepankan perdamaian dan kerja sama untuk penyelesaian suatu permasalahan, dipandang tepat untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan vital umat Islam serta sebagai upaya pencarian solusi untuk menyelesaikan konflik. Penulis juga menemukan bahwa dalam memperkuat diplomasi Islam, OKI melakukan dua peran penting, pertama, optimalisasi diplomasi dengan mengutamakan kerja sama dan perdamaian. Kedua, diplomasi yang berorientasi pada pencegahan dan penanganan konflik. Temuan ini bisa menjadi alternatif pengembangan diplomasi Islam sebagai jalur lain dalam hubungan internasional.

### Keywords

*Conflict, Cooperation, Diplomacy, Islam, OIC*

### Article History

Received August 9, 2022

Revised August 19, 2022

Accepted August 23,

2022

Published August 27,

2022

### Corresponding Author

Cantika Niscala Puri.

Prodi Hubungan

Internasional, Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas

Muhammadiyah Malang,

Jalan Raya Tlogomas No.

246 Tlogomas, Babatan,

Tegalondo, Kec.

Lowokwaru, Kota

Malang, Jawa Timur

65144.

---

## Pendahuluan

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan satu-satunya organisasi antar pemerintah yang mewakili umat Islam dunia ("Kemenpppa", 2016). Organisasi Kerjasama Islam dibentuk berdasarkan adanya berbagai isu-isu yang menyebar di berbagai belahan dunia terutama di bagian timur dengan berbagai isu keagamaan (Mughofar et al., 2016). Hal tersebut membawa pengaruh kepada negara-negara dengan mayoritas pemeluk Islam dengan menggabungkan dirinya bersama dengan negara-negara Islam lainnya dan membentuk organisasi keislaman. Tujuan didirikannya

OKI adalah untuk menciptakan rasa solidaritas antar negara anggota, menciptakan perdamaian dengan kerja sama, dan menyelesaikan permasalahan atau konflik yang melibatkan negara anggota OKI dan umat Muslim serta agar terbentuknya persatuan antar umat muslim, meningkatkan kerja sama dibidang ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan (Mughofar et al., 2016). Pendirian OKI ini berdasarkan resolusi pada 25 September 1969 yang dilaksanakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Rabat, Maroko, yang didasarkan atas respon negara-negara Islam terhadap insiden Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang mana insiden itu adalah pembakaran Masjid. OKI mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Jeddah tahun 1970 dan diputuskan untuk mendirikan sekretariat permanen yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (OIC, 2022). Sampai saat ini OKI merupakan organisasi besar kedua di dunia dengan keanggotaan sebesar 57 negara anggota di empat benua (OIC, 2022). Pembentukan OKI yang berdasarkan konsep ummah juga mencerminkan keinginan dari umat Islam diseluruh dunia untuk bersatu, terlepas dari politik, ekonomi, dan budaya (Fattah, 2005).

Pada awalnya, OKI berfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh Palestina, tetapi OKI sekarang memperluas fokus pada peningkatan kesejahteraan seluruh umat Islam di seluruh dunia dengan cara mempromosikan dan membangun kerja sama antar organisasi-organisasi dunia dan kerja sama antar negara, khususnya negara Muslim. Kerja sama OKI mencakup berbagai aspek seperti, politik, masalah sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, serta perdagangan. Perubahan fokus dari OKI ini bermula ketika adanya *OIC 10th Years Program of Actions* yang ditetapkan berdasarkan *blueprints* pada KTT Luar Biasa kelima di Makkah pada Desember 2005 (OIC, 2022). Tindakan tersebut dilakukan seiring banyak dan meningkatnya tantangan bagi negara-negara Islam. Program tersebut menjadi titik awal OKI dalam memfokuskan kebijakannya untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengupayakan penghapusan segala bentuk manifestasi dan diskriminasi terhadap Muslim. Kehadiran OKI juga dianggap sebagai pencapaian besar bagi dunia Islam.

Sehubungan dengan hal itu, diplomasi sangat erat kaitannya dengan seni, praktek, proses, dan aktivitas negosiasi suatu negara kepada negara lain demi tercapainya kepentingan nasional (Soesilowati, 2015). Diplomasi bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia, yang artinya dapat menciptakan rasa aman dan sejahtera bagi masyarakat internasional ("UMY", 2015). Dalam perkembangannya diplomasi tidak hanya mengenai pengiriman perwakilan dan negosiasi politik, tetapi diplomasi telah memiliki berbagai variasi di dalam praktiknya baik dari aktor, isu, instrument, dan kepentingan dari hasil diplomasi tersebut (Saptomo, 2020). Sehingga dapat dikatakan bahwa diplomasi adalah segala kegiatan/aktivitas dalam hubungan internasional, dimana aktor/pelakunya adalah negara atau aktor non-negara yang dilakukan demi mencapai kepentingan nasional. Namun, diplomasi yang dilakukan saat ini merupakan diplomasi konvensional yang dipandang masih memiliki banyak kelemahan. Negara melalui para diplomat melakukan berbagai cara dan upaya demi tercapainya kepentingan nasional. Tidak jarang hal tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan dan penekanan yang akan mengakibatkan pihak lain tunduk terhadap pihak yang melakukan penekanan (Pratiwi, 2017). Ancaman dan tekanan yang dilakukan suatu negara kepada pihak yang dituju tersebut dapat dalam bentuk pemberhentian bantuan luar negeri, embargo ekonomi, dan bahkan ancaman militer (Pratiwi, 2017). Bentuk dan cara dari implementasi diplomasi tersebut membuat diplomasi konvensional dipandang relatif

tidak bersih, sehingga perlunya membangun dan menguatkan diplomasi bersih berdasarkan perspektif Islam atau disebut dengan Diplomasi Islam.

Diplomasi Islam atau disebut juga dengan *clean diplomacy* adalah diplomasi yang berlandaskan pada perspektif Islam (Warsito & Surwondono, 2015). Diplomasi Islam juga dapat didefinisikan sebagai Diplomasi Islam dimaknai sebagai diplomasi yang berdasar pada risalah Islam rahmatan lil Alamin, yang mengutamakan perdamaian dan kerja sama dalam hubungan internasional dan perang hanya dilakukan apabila terpaksa (Saptomo, 2020). Diplomasi Islam memperkenalkan perubahan revolusioner dengan menanamkan prinsip diplomasi dan prinsip hukum internasional (Warsito & Surwondono, 2015). Islam secara lugas dan tegas menyatakan kesetaraan dan persamaan antar manusia serta larangan berbuat dzalim, selalu menjunjung tinggi keadilan, serta bersikap toleran dalam kehidupan sosial. Jika hal tersebut diterapkan dengan benar dan baik akan dapat menciptakan perdamaian. Dalam Islam, saat melakukan negosiasi dan diplomasi, haruslah memperhatikan dan memenuhi hak-hak musuh saat dalam keadaan damai maupun perang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah (Warsito & Surwondono, 2015). Di dalam diplomasi Islam juga terdapat aturan dan regulasi yang dibuat dengan seadil-adilnya bagi seluruh negara-negara di dunia, baik negara-negara Islam ataupun negara non-Islam (Nasirrudin et al., 2020). Islam juga memberikan fondasi dasar mengenai hubungan dan aktivitas bilateral dan multilateral yaitu dengan *al'adalah al 'alamiyyah* atau disebut dengan keadilan universal dan juga menjunjung tinggi *al-silm* atau keadaan damai (Hidayat, 2014). Dengan itu, maka proses dan hasil dari diplomasi akan berjalan dengan adil dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Islam dalam hubungan internasional adalah perdamaian yang mana penyelesaian suatu masalah yaitu dengan jalan damai yang nantinya akan berpengaruh pada terciptanya hubungan baik antar masyarakat internasional. Diplomasi Islam juga dapat menjadi suatu strategi diplomasi yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan dan mencapai kepentingan.

Diplomasi Islam yang dilakukan oleh OKI sangat berbeda dengan diplomasi konvensional yang memiliki banyak kekurangan dan relatif tidak bersih dalam pelaksanaannya. Dimana mereka melakukan pemaksaan dan penekanan yang akan mengakibatkan pihak lain tunduk terhadap pihak yang melakukan penekanan (OIC, 2022). Pemaksaan dan ancaman dari suatu negara kepada pihak yang dituju dapat berupa penangguhan bantuan luar negeri, embargo ekonomi, bahkan ancaman militer (Pratiwi, 2017). Dalam diplomasi Islam juga terdapat segala aturan dan regulasi yang telah dibuat dengan seadil-adilnya, dimana aturan dan regulasi tersebut berlaku untuk semua negara, baik negara dengan mayoritas beragama Islam maupun negara dengan mayoritas masyarakat non-Islam. Islam juga memberikan suatu fondasi dasar mengenai hubungan kerja sama dengan menerapkan keadilan universal dan mengutamakan kedaiamaian. Dengan menerapkan unsur-unsur tersebut maka proses dan hasil dari diplomasi akan berjalan dengan adil dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Bentuk dan cara dari implementasi diplomasi tersebutlah yang membuat diplomasi cara konvensional dianggap berbanding terbalik dengan nilai-nilai Islam, sehingga perlunya membangun dan menguatkan Diplomasi Islam.

Sebagai representasi negara-negara Islam di dunia global, OKI punya peran strategi dalam penguatan diplomasi Islam. OKI secara rutin mengadakan pertemuan atau konferensi tingkat tinggi internal OKI dalam merespon suatu permasalahan atau konflik yang melibatkan negara-negara anggota OKI. Dalam OKI terdapat dua pertemuan besar, yaitu Konferensi

Tingkat Tinggi (KTT) dan Pertemuan Menteri Luar Negeri (OIC, 2022). Selain itu, OKI juga menjalin kerja sama dengan PBB sebagai organisasi terbesar pertama di dunia dan juga menjalin kerja sama dengan organisasi internasional lainnya dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan vital umat Islam serta sebagai upaya pencarian solusi untuk menyelesaikan konflik. Pertemuan dan kerja sama tersebut dilakukan dengan menggunakan diplomasi Islam dengan tujuan melindungi norma, nilai, dan tentunya umat Islam. Adapun fokus prioritas utama dari OKI seperti, koordinasi dan kolaborasi antar negara anggota, penanganan Islamophobia, dan mempromosikan dan mengutamakan kepentingan vital umat Islam di dunia dalam forum internasional (OIC, 2022). OKI mempunyai kehormatan tunggal dalam membentuk kesatuan umat Islam dan secara aktif mewakili umat Islam (Khamsiani, 2018). Dalam aktivitas internasional ataupun penanganan konflik dengan menanamkan nilai-nilai moralitas sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini OKI juga dapat memainkan peran pelengkap sebagai mitra dari organisasi internasional seperti PBB dan lainnya. Peran tersebut dimainkan oleh OKI terutama sebagai mediator antar negara atau pihak-pihak yang berkonflik (OIC, 2022). Dalam hal ini, OKI telah menunjukkan perannya yang berorientasi pada kerja sama dan perdamaian dengan mendorong dan meningkatkan kerja sama eksternal dengan PBB, Uni Eropa, dan media internasional dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan Islamophobia di Perancis akibat adanya serangan pada tanggal 13 November 2015 yang terjadi di Paris (Khamsiani, 2018). OKI juga memfokuskan upaya-upaya anti terorisme, *interfaith dialogue* dan kerja sama yang dibangun OKI dengan PBB, Uni Eropa, dan media internasional. Pada intinya penelitian ini mengedepankan peran OKI dalam mendorong adanya pluralisme budaya dan mendorong rasa saling menghormati satu sama lain melalui pendekatan *Interfaith Dialogue* serta menekankan dan meningkatkan kerja sama eksternal OKI demi untuk menguatkan posisi Islam di dunia (Khamsiani, 2018).

Dari adanya aktivitas dan usaha yang telah dilakukan oleh OKI telah menunjukkan bahwa dalam kiprahnya, OKI telah mengupayakan berbagai usaha dan perannya dalam penguatan dan peningkatan Diplomasi Islam. Peran OKI dalam peningkatan dan penguatan diplomasi Islam sangat penting, karena OKI merupakan forum yang dapat digunakan untuk mempromosikan kepentingan dan mengumpulkan sumber daya di dunia Islam, memungkinkan negara-negara Islam untuk mencapai tujuannya. Tidak hanya itu, peran penting OKI dalam diplomasi Islam adalah sebagai wadah bagi negara-negara Islam untuk berdialog dengan satu titik fokus untuk kemajuan Islam di dunia internasional. Implementasi Diplomasi yang dilakukan oleh OKI haruslah berdasarkan pada tujuan OKI sesuai dengan Piagam OKI pasal 1. Implementasikan dalam hubungan internasional Islam didasarkan dua prinsip yaitu: pertama, dalam menjalin hubungan dan melaksanakan diplomasi harus dilandasi prinsip memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Kedua, dalam melakukan hubungan internasional dan diplomasi, hendaknya memenuhi segala kesepakatan dan perjanjian yang telah disetujui (Kailani, 2016). Sehingga implementasi diplomasi Islam akan lebih efektif, komprehensif, dan lebih berkualitas serta mampu mencapai tingkat kebenaran absolut serta membedakan antara diplomasi Islam yang bersih dengan diplomasi konvensional, yang relatif kotor dan hanya mencari keuntungan sepihak.

Oleh karena itu, dalam implementasi penguatan dan peningkatan Diplomasi Islam dibutuhkan dukungan dari negara-negara Islam, terutama dari Organisasi Kerjasama Islam yang

dinilai memiliki peran penting dalam penguatan Diplomasi Islam. Peran OKI dalam kemajuan diplomasi Islam sangatlah penting, karena OKI merupakan wadah yang dapat digunakan untuk mempromosikan kepentingan dan mengumpulkan sumber daya yang ada pada dunia Islam sehingga membuat terbukanya akses bagi negara-negara Islam untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga langkah-langkah yang akan diambil OKI kedepannya akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi tercapainya perdamaian dunia dengan melakukan dua peran penting yaitu peran diplomasi yang berorientasi kerja sama dan perdamaian serta peran diplomasi yang berorientasi pencegahan dan penanganan konflik.

### **Diplomasi Islam**

Diplomasi Islam dapat didefinisikan sebagai hubungan resmi antara dua negara berdasarkan Al-Qur'an, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya (UNIDA, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Diplomasi dalam perspektif Islam memiliki berbagai aturan dan regulasi sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits. Dr. Afzal Iqbal dalam bukunya yang berjudul Diplomasi Islam mendefinisikan bahwa Diplomasi Islam adalah Diplomasi yang dilakukan Rasulullah yang mengedepankan kesopanan dalam menjalin hubungan dan memegang keyakinan akan kebenaran (Afzal, 2000). Dalam bukunya, Ia juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan sikap Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam bergosiasi dan dalam pengambilan keputusan.

Tulus Warsito dan Surwandono mengemukakan bahwa Diplomasi Islam atau disebut juga dengan *clean diplomacy* adalah diplomasi yang berlandaskan pada perspektif Islam (Warsito & Surwondono, 2015). Ia juga mengemukakan Rahmatan Lil 'Alamin sebagai sebuah konsep untuk membedakan antara diplomasi Islam yang dipandang bersih dan menjunjung persamaan dengan diplomasi yang konvensional yang relatif tidak bersih, tidak konsisten, dan hanya mencari keuntungan sepihak (Warsito & Surwondono, 2015).

Sedangkan Buyan Saptomo mendefinisikan bahwa Diplomasi Islam merupakan diplomasi berdasar pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mana didalamnya terdapat ajaran yang berkaitan dengan *global governance*, *international relations*, dan diplomasi (Saptomo, 2020). Ia juga mengemukakan mengenai lima pengertian yang terkait dengan Diplomasi Islam, yaitu: Diplomasi menurut ajaran Islam, Sejarah Diplomasi Islam, Diplomasi oleh negara Islam, Diplomasi oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Diplomasi oleh Ormas Islam (Saptomo, 2020). Implementasi Diplomasi Islam menurut Saptomo juga harus menunjukkan risalah Islam sebagai *Rahmatan Lil 'Alamin* yang mengutamakan perdamaian dan mengedepankan kerja sama.

Dari berbagai definisi mengenai Diplomasi Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa Diplomasi Islam merupakan segala aktivitas diplomasi yang dilakukan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam bergosiasi dan mengambil keputusan. Diplomasi Islam juga memiliki karakteristik yang merujuk pada konsep *Rahmatan Lil 'Alamin* yang mengutamakan kerja sama dan perdamaian serta mencegah terjadinya peperangan. Islam juga memberikan suatu fondasi dasar mengenai hubungan dan aktivitas bilateral dan multilateral yaitu dengan al'adalah al 'alamiyyah atau disebut dengan keadilan universal dan juga menjunjung tinggi al-silm atau keadaan damai (Hidayat, 2014).

OKI sebagai suatu organisasi kerja sama terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran penting dalam peningkatan dan penguatan Diplomasi Islam. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan keterbukaan akses bagi negara-negara Islam agar mampu mencapai kepentingan mereka dan sebagai suatu sarana untuk mengumpulkan sumber daya yang ada pada dunia Islam sehingga mampu mendorong kemajuan Islam di dunia internasional. OKI dalam kiprahnya mengupayakan berbagai usaha dan perannya dalam penguatan dan peningkatan Diplomasi Islam. OKI mengedepankan peran strategisnya yang berorientasi pada kerja sama dan perdamaian seperti, *Pertama*, mengadakan KTT dan pertemuan lain antar negara-negara anggota dengan fokus pembahasan menciptakan perdamaian dan mensejahterakan umat Islam diseluruh dunia. *Kedua*, untuk lebih menguatkan posisi diplomasinya, OKI menjalin berbagai kerja sama dengan pihak eksternal seperti adanya kerja sama OKI dengan Uni Eropa. *Ketiga*, peran strategis yang dilakukan OKI selanjutnya adalah peran yang berorientasi penanganan dan pencegahan konflik. Hal ini diimplementasikan dengan berbagai upaya penanganan konflik di berbagai kasus seperti, adanya isu muslim di Pattani Thailand Selatan, kasus Islamophobia di Perancis, dan konflik Rohingya di Myanmar. Penangan dan penyelesaian konflik tersebut tentunya mengedepankan diplomasi yang sesuai dengan diplomasi Islam yang sedang dibangun dan dikuatkan oleh OKI. Dengan usaha dan proses diplomasi dan negosiasi tersebut maka akan memberi keuntungan bagi semua pihak serta menciptakan rasa adil yang dapat meminimalisir terjadinya konflik atau perang. Tujuan yang ingin diwujudkan dan diterapkan oleh Islam dalam hubungan internasional adalah perdamaian yang mana penyelesaian suatu masalah yaitu dengan jalan damai yang nantinya akan berpengaruh pada terciptanya hubungan baik antar masyarakat internasional. Oleh karena itu, dalam implementasi penguatan dan peningkatan Diplomasi Islam tentunya membutuhkan dukungan dari negara-negara Islam terutama dari OKI yang dinilai memiliki peran penting dalam penguatan Diplomasi Islam. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, menarik untuk menganalisis bagaimana peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam penguatan diplomasi Islam.

## Metode

Metode yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis mencari sejumlah literatur, termasuk jurnal, dan artikel, melalui aplikasi *Harzing's Publish or Perish*. Kata kunci yang digunakan adalah Organisasi Kerjasama Islam dan Diplomasi Islam. Penulis mengklasifikasikan dan menganalisis data berdasarkan pada buku, jurnal maupun artikel-artikel yang telah dikumpulkan dengan menggunakan model analisis milik Miles dan Huberman. Model ini menganalisis data dengan menggunakan beberapa cara yaitu dengan langkah pengumpulan sumber data, pereduksi dan sumber data, serta uni memverifikasi atau menyimpulkan. Langkah pertama yaitu, pengumpulan data berdasarkan pada sumber-sumber yang ada dan melakukan kategorisasi data sesuai dengan masalah penelitian. Kedua, penulis melakukan reduksi data dengan menajamkan dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga topik tulisan dapat terfokus. Ketiga, penyajian data, penulis menyajikan data dengan cara memberikan narasi sesuai dengan fokus penelitian. Terakhir, penarikan kesimpulan, kesimpulan didapatkan berdasarkan pada data yang telah direduksi lalu disajikan sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Model analisis tersebut dipilih agar data-data yang diperoleh sesuai dengan tema dan lebih terstruktur.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Peran Diplomasi Berorientasi Kerja Sama dan Perdamaian

Peran strategis OKI yang berorientasi pada kerja sama dan perdamaian ini dapat dilihat dari dalam tubuh OKI sendiri, yang mana OKI beserta negara-negara anggota mengupayakan berbagai cara untuk dapat menciptakan perdamaian dilakukan dengan beberapa hal, seperti

*Pertama*, mengadakan KTT dan pertemuan lain antar negara-negara anggota dengan fokus pembahasan menciptakan perdamaian dan mensejahterakan umat Islam diseluruh dunia. Sebagai sebuah organisasi internasional yang pada awalnya memfokuskan diri untuk memperhatikan masalah politik, khususnya masalah Palestina, Organisasi Konferensi Islam dalam perkembangannya telah mengubah dirinya menjadi sebuah wadah kerja sama bagi negara-negara Islam dalam segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, masyarakat, budaya, dan ilmu pengetahuan (Kemlu, 2014). OKI menyelenggarakan KTT ke-10 antara Kepala Negara pada 11-17 oktober 2003 di Putrajaya, Malaysia. Pertemuan ini sebagai suatu upaya konkret dalam restrukturisasi Sekretariat OKI, yang berfokus dalam empat aspek, yaitu penyederhanaan struktur, peningkatan keuangan, metodologi, dan juga sumber daya manusia (Kemenpppa, 2016). Selanjutnya, pada KTT Luar Biasa ke-3 yang dilaksanakan pada 7-8 Desember 2005 di Makkah, arab Saudi telah memenuhi keinginan OKI yang dituangkan dalam *OIC 10-years Program of Actions* dan *Macca Declaration*, yang mana keduanya membawa OKI kedalam restrukturisasi dan reformasi dalam tubuh OKI (Kemlu, 2014). *OIC 10-years Program of Actions* menandai dimulainya perkembangan fokus Organisasi Kerjasama Islam yang semula hanya memiliki fokus pada masalah politik, menjadi memiliki berbagai fokus seperti, HAM, sosial, dan ekonomi. Program tersebut membahas tantangan politik dan ilmu pengetahuan serta isu-isu yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan, ekonomi, sosial, dan ilmiah, dengan tujuan untuk menutup kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat (Kemlu, 2014). Hal tersebut dilakukan dengan harapan mampu menangani berbagai keprihatinan, termasuk upaya untuk menanamkan cita-cita toleransi, penghapusan kekerasan, penghapusan ekstremisme, dan terorisme, serta pemberantasan Islamophobia.

Adapun implementasi dari *OIC 10-years Program of Actions* yaitu dibentuknya *The Independent Permanent Human Rights Commission* (IPHRC) sebagai suatu badan yang bekerja secara independen dalam masalah hak asasi manusia. yang berfokus pada kerja sama negara anggota OKI dalam memprioritaskan isu HAM (Ramadhan, 2014). IPHRC ini dibentuk berdasarkan makna dan isi dari Piagam OKI yang telah disetujui dalam KTT Islam ke-111 yang bertempat di Dakar, Senegal pada tanggal 13-14 Maret 2008 (Hidayat, 2014). Dalam kiprahnya IPHRC sangat konsisten mengupayakan tercapainya nilai-nilai HAM dan secara terbuka menerima ide dan saran dari negara-negara anggota yang berkaitan dengan kepentingan Islam dan penegakan HAM. Kerja sama IPHRC ini terlihat dari berbagai periode sesi pertemuan yang mana pada setiap periode sesi terdapat negara-negara anggota yang menjadi komisioner IPHRC. Pada periode 2012-2018, Indonesia sebagai komisaris IPHRC telah berhasil menyelenggarakan sesi *inaugural* dari IPHRC pada 20-24 Februari 2012 dan OKI juga telah pada tanggal 4-6 Desember 2012 OKI juga telah berhasil menyelenggarakan Konferensi Menteri Luar Negeri OKI dengan tema *Role of Women in Development* (Kemlu, 2019). Dalam konferensi tingkat menteri yang diadakan di Jakarta tersebut telah melahirkan *Jakarta Declaration* yang berisi langkah-langkah dalam peningkatan dan penguatan implementasi dari berbagai kebijakan dan komitmen yang telah

dibentuk, contohnya penetapan indikator evaluasi dan pengawasan terhadap *OIC Plan of Action for the Advancement of Women* (OIC-IPHRC, 2020).

*Kedua*, untuk lebih menguatkan posisi diplomasinya, OKI menjalin berbagai kerja sama dengan pihak eksternal seperti adanya kerja sama OKI dengan Uni Eropa. Kerja sama OKI dengan Uni Eropa ini mengenai pembentukan Misi Pengamat Permanen di Brussels, Belgia telah terbentuk sebelum adanya peristiwa Islamophobia di Perancis (Khamsiani, 2018). Pembentukan Misi Pengamat tersebut didasarkan pada tingginya Islamophobia di Eropa. Oleh karena itu, OKI membangun dan meningkatkan hubungan menjadi lebih inklusif dengan negara-negara Eropa. Dengan terbentuknya Misi Pengamat tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan OKI dalam mencari fakta-fakta terkait Islamophobia dan untuk menelaah HAM di Eropa. Sejak 2014 kerja sama antara OKI dengan Uni Eropa semakin erat yang ditandai dengan diadakannya pertemuan tingkat tinggi antara OKI dan Uni Eropa pada 8-9 September 2014 yang untuk pertama kalinya diadakan di Brussels dan bertempat di Gedung Uni Eropa (Khamsiani, 2018). Pada pertemuan tersebut membahas mengenai perlindungan umat Muslim sebagai mayoritas di Eropa, anti terorisme, radikalisme, Islamophobia, dan keamanan. Hingga tahun 2017, OKI dan UE masih memiliki hubungan kerja sama yang erat, yang ditunjukkan dengan adanya keberlangsungan pembahasan mengenai penguatan kolaborasi di kedua belah pihak. Kerja sama dan aktivitas bilateral yang terjalin antara OKI dengan UE, membuat suatu penegasan tersendiri yaitu OKI mempunyai peran penting dalam menciptakan dan mempromosikan toleransi, perdamaian, dan penghormatan terhadap HAM.

## **2. Peran Diplomasi yang Berorientasi Pencegahan dan Penanganan Konflik**

Peran strategis OKI selanjutnya adalah peran yang berorientasi penanganan dan pencegahan konflik. Peran ini implementasikan oleh OKI dengan berbagai upaya penanganan konflik di berbagai kasus seperti, adanya isu muslim di Pattani Thailand Selatan, kasus Islamophobia di Perancis, dan konflik Rohingya di Myanmar.

Penangan dan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh OKI tersebut tentunya mengedepankan diplomasi *soft power* sesuai dengan diplomasi Islam yang sedang dibangun dan dikuatkan oleh OKI. Contohnya, pada kasus isu muslim di Pattani Thailand Selatan yang mana didasari oleh serangan terhadap Masjid Krue Se yang dilakukan oleh militer Thailand pada 28 April 2004 dan adanya kekerasan di wilayah Tak Bai, Narathiwat, yang mana insiden tersebut menewaskan 86 orang muslim Pattani yang terjadi pada 25 Oktober 2004 (OIC-IPHRC, 2020). Hal itu menyebabkan berbagai kecaman keras dari masyarakat internasional, khususnya dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kecaman dari OKI tersebut disampaikan oleh Prof Ekhemden Ihsanoglu sebagai Sekretaris Jenderal. OKI mengecam kejadian yang menewaskan 86 Muslim di Pattani serta menuntut dan menekan pemerintah Thailand untuk menghilangkan diskriminasi dan menjamin hak-hak minoritas terutama hak-hak Muslim di Thailand (Rachman, 2019). Tidak hanya itu, OKI juga menekan pemerintah Thailand untuk melakukan dialog bersama antara OKI dan negara-negara Islam. Kritik keras OKI itu langsung direspon dengan baik oleh pemerintah Thailand. Dimana pemerintah Thailand langsung mengirimkan utusan khusus untuk bertemu dan berdiskusi dengan OKI. Sekretaris Jenderal OKI dan utusan khusus Thailand, Nissai Vejjajiva, dan Dr. Surakiart telah bertemu di Sekretariat Jenderal OKI Pada tanggal 5 Maret 2005 (Rachman, 2019).

Dalam pertemuan itu, delegasi Thailand mengemukakan situasi, kondisi, dan fakta-fakta terjadinya insiden Pattani. Pemerintah Thailand juga menerangkan mengenai langkah-langkah dalam memulihkan situasi dan kondisi di Pattani serta menyatakan keinginan pemerintah Thailand menciptakan perdamaian dan ketentraman di Pattani dengan mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui ekonomi, sehingga aspek-aspek kehidupan lainnya juga dapat mengalami peningkatan (Rachman, 2019). OKI juga menyatakan kesiapan dalam berkontribusi menciptakan perdamaian. Hal tersebut diimplementasikan dengan diperkuatnya kerja sama antar OKI dan Thailand dengan pertimbangan adanya itikad baik dari Thailand dan posisi Thailand sebagai salah satu negara pengamat OKI. Kerja sama tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim di Thailand. Pada akhir Juni 2005 OKI mengadakan kunjungan ke Thailand dengan tujuan untuk meninjau langsung kondisi dan situasi umat Muslim di wilayah selatan Thailand, terutama di Pattani (Rachman, 2019). Dari hasil tinjauan tersebut ditemukan fakta-fakta dibalik terjadinya konflik Pattani yang mana penyebab utama konflik tersebut adalah adanya budaya di wilayah selatan Thailand (Rachman, 2019).

Adapun penyelesaian isu dan masalah yang dilakukan oleh OKI dengan cara mengedepankan penekanan peran diplomatik sebagai inisiator, mediator, serta fasilitator. Peran OKI tersebut diambil berdasarkan atas tujuan untuk mengembalikan citra baik Islam di mata dunia.

#### a. Inisiator dan Mediator

Peran tersebut dapat dilihat dari Islamophobia yang terjadi di Perancis yang mana Islamophobia di Perancis semakin meningkat ketika adanya serangan terhadap pusat penerbitan majalah Charlie Hebdo dan diikuti juga oleh serangan 13 November 2015, dampak dari serangan tersebut Muslim mengalami tindakan-tindakan rasisme dan sering menimbulkan konflik. Hal seperti itulah yang membuat semakin meningkatnya Islamophobia di Perancis (Amrad, 2020). Dalam hal ini, OKI berupaya untuk melindungi umat Muslim di Perancis serta mengembalikan citra baik Islam di mata dunia. Oleh karena itu, OKI memainkan fungsi diplomatik penting sebagai inisiator dan mediator. Selain itu, OKI juga melakukan kerja sama dengan Uni Eropa dan PBB untuk menghilangkan prasangka agama dan intoleransi di kalangan umat beragama. Hal tersebut membuat OKI harus memosisikan diri sebagai inisiator, mediator, dan sekaligus fasilitator dalam konflik tersebut. Peran tersebut dilakukan oleh OKI dengan tujuan untuk melindungi umat Islam di Perancis dan mengembalikan citra Islam di mata dunia. OKI dengan sigap mengambil tindakan dengan menyerukan kepada dunia internasional untuk menuntut dan mendesak pemerintah Perancis agar bersikap adil kepada kaum Muslim di Perancis. OKI juga melakukan inisiasi untuk menggalang keprihatinan dunia internasional sehingga bantuan dan dukungan dari masyarakat internasional akan berdampak pada kesuksesan penyelesaian Islamophobia di Perancis.

Selanjutnya, Konflik Rohingya di Myanmar yang telah menarik banyak kecaman dari dunia internasional, terutama kecaman dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Sebenarnya, keberpihakan OKI terhadap kondisi umat Muslim sudah dilakukan sejak lama, yang mana OKI menyerukan kepada negara-negara anggota untuk selalu berkontribusi terhadap perlindungan dan kesejahteraan umat Islam di dunia dan menyerukan untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan negara anggota OKI dan umat Islam di dunia. OKI juga menyerukan kepada dunia internasional untuk menekankan fokus untuk

meningkatkan perlindungan terhadap identitas dan hak asasi masyarakat muslim yang menjadi masyarakat minoritas di suatu negara. Peran tersebut dapat dilihat dari perannya sebagai inisiator, mediator, dan fasilitator. OKI menjalankan peran tersebut berdasarkan dengan Diplomasi Islam.

Peran Inisiator dan Mediator yang diambil oleh OKI yaitu dengan mengancam tindakan pelanggaran HAM terhadap Myanmar dan dunia internasional untuk menekan pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik tersebut. Hal tersebut direspon oleh negara anggota OKI yang memiliki kedekatan geografis dengan Myanmar yaitu, Indonesia dan Malaysia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespon dengan mengirimkan sebuah pesan diplomatik kepada Myanmar dan perencanaan kunjungan ke Myanmar (Dewinta et al., 2016). Sedangkan Malaysia merespon dengan mendesak Myanmar agar mengambil upaya-upaya penyelesaian konflik. OKI juga telah membawa kasus Muslim Rohingya tersebut ke forum-forum internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan ASEAN untuk mendesak dan menekan pemerintah Myanmar agar mengembalikan identitas dan hak Muslim Rohingya. Peran dari OKI tersebut membuahkan hasil yaitu dengan dikirimkannya utusan PBB ke Myanmar pada tanggal 24 Maret 2013 (BBC, 2017). Pengiriman utusan tersebut ditujukan untuk menyelidiki kasus Rohingya dan mendesak pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kasus tersebut.

#### b. fasilitator

Dalam memainkan peran sebagai fasilitator OKI memberikan fasilitas bantuan terhadap para korban OKI peristiwa Charlie Hebdo dan juga untuk umat Muslim yang terkena dampak negatif dari Islamophobia di Perancis (Anandaru, 2021). Pada saat itu, OKI juga menjadi jembatan dalam mempertemukan Presiden Bulan Sabit Merah Qatar pada dan Yayasan Amal Internasional dengan pejabat politik Perancis untuk melakukan pembahasan mengenai dukungan bantuan oleh OKI kepada para korban (Dewinta et al., 2016). Pertemuan tersebut membawa hasil yang positif yang mana pemerintah Perancis setuju menerima bantuan dari OKI. OKI juga mengirimkan utusan-utusan khusus ke Perancis untuk melihat dan memastikan kondisi umat Muslim di Perancis dan untuk bertemu dengan pemerintah Perancis dengan tujuan membahas mengenai kondisi umat Muslim serta bertemu dengan pemuka agama di Perancis untuk mendiskusikan cara mengurangi dan menghilangkan Islamophobia di Perancis.

Sedangkan peran sebagai fasilitator yang dimainkan oleh OKI dalam konflik Rohingya yaitu dengan mengirimkan utusan khusus ke Myanmar yang diwakili oleh Jusuf Kalla, Atta El-Manan, Asisten Sekretaris Jenderal OKI, Presiden Bulan Sabit Merah Qatar, dan perwakilan dari organisasi amal Kuwait (Siba & Qomari'ah, 2018). Utusan khusus tersebut bertemu dengan presiden Myanmar, Thein Sein untuk membahas mengenai bantuan OKI terhadap Muslim Rohingya. Pembahasan tersebut menghasilkan persetujuan Presiden Myanmar terhadap pembukaan akses bagi bantuan dari OKI. OKI juga memberi bantuan sebesar 25 juta dollar A.S. untuk korban konflik dan mobilisasi *Islamic Development Bank* dalam memberikan bantuan berupa pendidikan dan kesehatan (Dewinta et al., 2016).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat OKI mempunyai komitmen yang kuat dalam pengembangan diplomasi Islam. Hal ini didasari oleh adanya berbagai upaya dan usaha OKI dalam mengedepankan diplomasi Islam. Paling tidak dua peran penting yang dilakukan oleh OKI

yaitu, peran OKI yang berorientasi kerja sama dan perdamaian dan peran diplomasi yang berorientasi pencegahan dan penanganan konflik.

Dalam kiprahnya, peran yang berorientasikan pada kerja sama dan perdamaian yang dilakukan OKI yaitu, OKI telah melakukan pertemuan atau konferensi tingkat tinggi internal OKI dalam merespon suatu permasalahan atau konflik yang melibatkan negara-negara anggota OKI. Aktivitas-aktivitas OKI tersebut menciptakan suatu program yang disebut *OIC 10-years Program of Actions* yang mana menandai perubahan fokus Organisasi Kerjasama Islam yang semula hanya memiliki fokus pada masalah politik, menjadi memiliki berbagai fokus seperti, HAM, sosial, dan ekonomi. Adanya *OIC 10-years Program of Actions* yang menjadi suatu program pemicu meluasnya fokus OKI dan meningkatnya kerja sama antara negara-negara OKI, terbentuknya *The Independent Permanent Human Rights Commission* (IPHRC) sebagai suatu badan independen dalam masalah hak asasi manusia serta berfokus pada kerja sama negara anggota OKI dalam memprioritaskan isu HAM, dan adanya kerja sama eksternal yaitu kerja sama OKI dengan Uni Eropa, yang ditandai oleh pembentukan Misi Pengamat Permanen di Brussels, Belgia dengan tujuan untuk menangani permasalahan Islamophobia di Eropa.

Adapun peran diplomasi yang dilakukan OKI yang berorientasi pada penanganan dan penyelesaian konflik seperti, kecaman keras OKI terhadap pemerintah Thailand mengenai Isu Muslim di Pattani Thailand Selatan. Kecaman tersebut di respon baik oleh pemerintah Thailand dengan langsung mengirimkan utusan khusus untuk bertemu dan berdiskusi dengan OKI dan mengungkapkan keinginan kuat untuk bekerja sama membina perdamaian dan harmoni di wilayah Selatan. Selanjutnya adanya penanganan Islamophobia di Perancis dan Konflik Rohingya di Myanmar yang mana peran OKI disini adalah sebagai inisiator, mediator, dan fasilitator.

Peran inisiator dan mediator dalam isu Islamophobia OKI yaitu, menyerukan kepada dunia internasional untuk menuntut dan mendesak pemerintah Perancis agar bersikap adil kepada kaum Muslim di Perancis serta OKI mengupayakan bantuan dan dukungan dari masyarakat internasional pada kesuksesan penyelesaian Islamophobia di Perancis. Sedangkan peran fasilitator yaitu, OKI menjadi jembatan dalam mempertemukan Presiden Bulan Sabit Merah Qatar pada dan Yayasan Amal Internasional dengan pejabat politik Perancis untuk melakukan pembahasan mengenai dukungan bantuan oleh OKI kepada para korban.

Dalam kasus konflik Rohingya, OKI telah membawa kasus Muslim Rohingya tersebut ke forum-forum internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan ASEAN untuk mendesak dan menekan pemerintah Myanmar agar mengembalikan identitas dan hak Muslim Rohingya serta OKI telah mengirimkan utusan khusus ke Myanmar yang diwakili oleh Jusuf Kalla, Atta El-Manan, Asisten Sekretaris Jenderal OKI, Presiden Bulan Sabit Merah Qatar, dan perwakilan dari organisasi amal Kuwait. Utusan khusus tersebut bertemu dengan presiden Myanmar, Thein Sein untuk membahas mengenai bantuan OKI terhadap Muslim Rohingya. OKI menjalankan peran tersebut berdasarkan dengan Diplomasi Islam yang lebih mengutamakan penyelesaian masalah.

## Referensi

- Afzal, I. (2000). *Diplomacy In Early Islam*. In *Pustaka Al-Kautsar*. Pustaka Al-Kautsar.
- Amrad, A. (2020). *Analisis Kecenderungan Peningkatan Islamofobia Di Perancis Pasca Arab Spring* [Universitas Islam Indonesia].  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29189;jsessionid=F762E53AF389E19F27BCEC4BD459F90E>
- Anandaru, A. B. (2021). *Analisis Peran Oki Dalam Kasus Islamophobia Di Prancis Pada Tahun 2015* [Universitas Islam Indonesia].  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31701?show=full>
- BBC. (2017, March). *Utusan khusus PBB sebut militer Myanmar lakukan “kejahatan terhadap kemanusiaan”* - BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39227570>
- Dewinta, R. T. A., Windiani, R., & Hanura, M. (2016). Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya Di Myanmar Tahun 2012-2013. *Journal of International Relations*, 2(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v2i2.11140>
- Fattah, A. (2005). Proposisi Kewargaan Dalam Islam: Tafsir Baru Konsep Ummah. *Ulumuna*, 9(2), 239–256. <https://doi.org/10.20414/UJIS.V9I2.485>
- Hidayat, A. (2014). Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomatik pada Masa Damai). *Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 02(03). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v2i03.125>
- Kailani, K. (2016). Islam Dan Hubungan Antar Negara. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 14(2).  
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/471>
- Kemenpppa. (2016, February). *Informasi Singkat Tentang Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dan Konferensi Tingkat Menteri (KTM)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/572/informasi-singkat-tentang-organisasi-kerjasama-islam-oki-dan-konferensi-tingkat-menteri-ktm>
- Kemlu. (2014, January). *Organisasi Kerja Sama Islam OKI*. Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.  
[https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman\\_list\\_lainnya/organisasi-kerja-sama-islam-oki](https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-islam-oki)
- Kemlu. (2019, March). *Institusi Ham Di Asean Dan OKI*. Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.  
[https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/104/halaman\\_list\\_lainnya/institusi-ham-di-asean-dan-oki](https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/104/halaman_list_lainnya/institusi-ham-di-asean-dan-oki)
- Khamsiani, Y. (2018). *Peran OKI Dalam Upaya Mengatasi Tindakan Islamophobias di Perancis Pasca Tragedi Serangan 13 November Periode 2015-2017* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43648>
- Mughofar, J. K., Arisusanto, H., & Hanief, I. (2016). *Eksistensi Dan Peranan Organisasi Kerja Sama Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.  
[https://www.academia.edu/30640223/EKSISTENSI\\_DAN\\_PERANAN\\_ORGANISASI\\_KERJA\\_SAMA\\_ISLAM\\_OKI](https://www.academia.edu/30640223/EKSISTENSI_DAN_PERANAN_ORGANISASI_KERJA_SAMA_ISLAM_OKI)
- Nasirrudin, M., Mulyani, R., & Hadi, N. (2020). Teori dan Praktek Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam. *Jurnal Madinatul Qur'an*, 1(1).  
<https://jurnal.iais.ac.id/index.php/madinatulquran/article/view/55>
- OIC-IPHRC. (2020). *Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) of The Organisation of Islamic Cooperation (OIC)*. Independent Permanent Human Rights Commission.  
<https://oic-iphrc.org/home/#:~:text=OIC Independent Permanent Human Rights Commission holds its 19th Regular,from 22-26 May 2022.>

- OIC. (2022). *History. Organisation of Islam Cooperation*. [https://www.oic-oci.org/page/?p\\_id=52&p\\_ref=26&lan=en](https://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en)
- Pratiwi, T. D. (2017). Relevansi Penyusunan Teori Diplomasi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic World and Politics*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jiwp.1106>
- Rachman, A. (2019). *Upaya Organisasi Kerjasama Islam Menangani Isu Muslim Pattani Di Thailand Selatan (2005-2015)* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30097?show=full>
- Ramadhan. (2014). Kepentingan Indonesia Dalam Pembentukan Mekanisme Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC ) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Tahun 2011 [Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta]. In *Repository UIN Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40464>
- Saptomo, B. (2020). Penguatan Diplomasi Islam. *Prodising ISID*, 1, 15–20. <https://doi.org/10.37092/PROSIDINGISID.V1I1.174>
- Siba, M. A. M., & Qomari'ah, A. N. (2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2), 367–385. <https://doi.org/10.18196/jiwp.2221>
- Soesilowati, S. (2015). Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan. *Global Strategis*, 9(2), 293–308. <https://doi.org/10.20473/JGS.9.2.2015.293-308>
- UMY. (2015, October). *Tujuan Diplomasi Adalah Untuk Ciptakan Perdamaian Dunia – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://www.umy.ac.id/tujuan-diplomasi-adalah-untuk-ciptakan-perdamaian-dunia>
- UNIDA. (2021). *Diplomasi Islam*. Universitas Darussalam Gontor. <https://hi.unida.gontor.ac.id/diplomasi-islam>
- Warsito, T., & Surwondono. (2015). “Diplomasi Bersih” Dalam Perspektif Islam. *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 16(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/thaq.2015.%25x>